

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN AL-MAWARDI  
TENTANG PEMILIHAN PEMIMPIN DAN RELEVANSINYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Epri Setiawan  
NPM: 1621020332**

**Prodi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN AL-MAWARDI  
TENTANG PEMILIHAN PEMIMPIN DAN RELEVANSINYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syar'**

**Oleh:**

**EPRI SETIAWAN  
NPM 1621020332**

**Jurusan: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021M**

## ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah menjadi isu yang menarik pada setiap zaman, sudah banyak bermunculan tokoh-tokoh Islam yang menyusun konsep tentang pemilihan pemimpin di antaranya yaitu Al-Mawardi. Ia seorang tokoh ahli fikih terkemuka dari kalangan Madzhab Syafi'i dan paling berpengaruh di bidang siyasah pada masa Daulah Abbasiyah hidup antara abad ke tiga hijriyah. Namun demikian meskipun di negara kita sudah dirumuskan undang-undang tersendiri mengenai pemilihan seorang pemimpin, alangkah baiknya dapat mengakomodasi pemikiran tokoh-tokoh Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama* bagaimana analisis fikih siyasah terhadap pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin?. *Kedua* bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah?. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer berupa buku *Al-Ahkam As-Shulthaniyah* karya Abu Hasan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah kemudian sumber skunder seperti buku, karya ilmiah, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan penguji lainnya seperti sumber data tersier.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Mawardi diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin dalam suatu wilayah, sedangkan mekanisme pemilihan kepala daerah proses pengangkatannya dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama* pengangkatan dengan cara ditunjuk langsung melalui akad oleh khilafah, *kedua* pengangkatan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khilafah bidang pemerintahan). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun Relevansi antara pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ialah mempunyai syarat dan karakteristik yang sama terhadap calon pemimpin yaitu bersifat adil, memiliki ilmu yang luas, sehat jasmani dan rohani. Perbedaannya hanya pada pemikiran Al-Mawardi ketentuan seorang pemimpin harus dari golongan suku Qurais. Adapun dalam mekanisme tidak terdapat relevansi.

**Kata kunci:** Pemilihan, kepala daerah





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul :** Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang  
Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala  
**Nama :** Daerah  
**NPM :** Epri Setiawan  
**Jurusan :** 1621020332  
**Fakultas :** Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.**

**Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

**NIP. 197012282000031002**

**Ketua Jurusan**

**Frenki M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi  
tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh Epri Setiawan  
NPM 1621020332 Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), telah  
diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  
pada Hari/Tanggal: Februari 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Irwansyah, M.A.**

(.....)

**Sekretaris : Hasanudin Muhammad, M.H.**

(.....)

**Penguji I : Dr. Gandi Liyorba Indra, M.Ag.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Muhammad Zaky, A.Ag, M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I, M.Sy.**

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

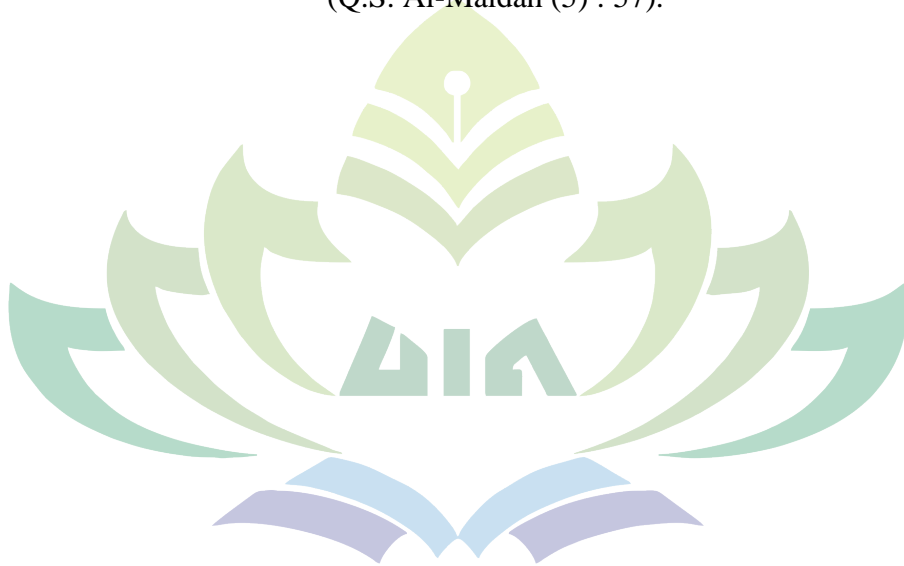
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

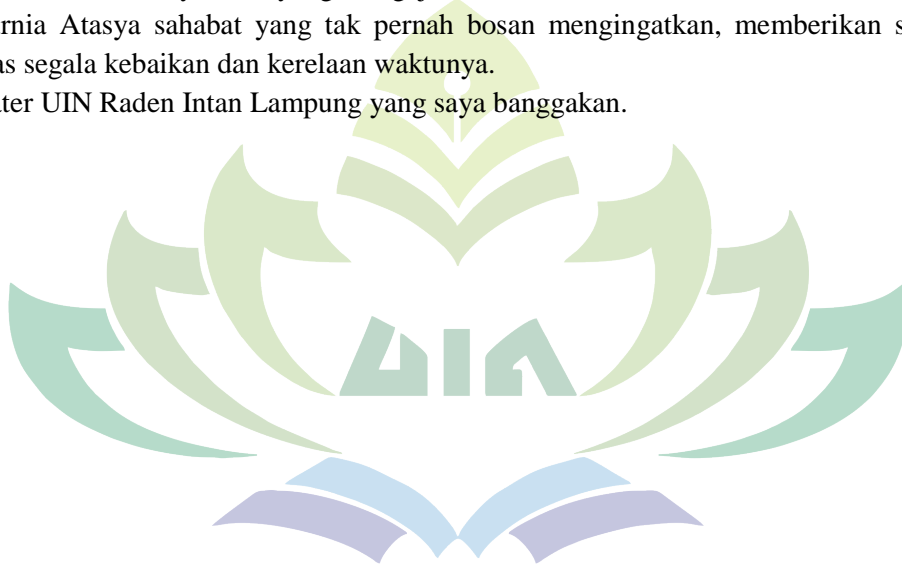
*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”.  
(Q.S. Al-Maidah (5) : 57).*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta yakni,

1. Ayahanda Darso dan Ibunda Tarmini yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta motivasi selama ini.
2. Adik saya tercinta Yunita Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman seperjuangan Siyasah E yang telah memberikan pengalaman dan banyak kenangan, untuk semuanya semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
4. Kelompok 120 KKN Talang Padang yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta yang mengajarkan arti kekompakan dan kebersamaan.
5. Teman-teman khususnya Sofwan Asfa, M.Prabowo Wicaksono, Nuzul Aji Kuncoro, Rois safrindo, Muhammad Buhanudin, dan Alfian Rizky Sirojudin yang selalu ada dalam setiap waktu dan yang tak segan memberikan kritik sekaligus saran selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
6. Danti Rahmawati seorang yang selalu saya sebut dalam doa, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasinya serta yang mengajarkan arti kesabaran.
7. Ayu Kurnia Atasya sahabat yang tak pernah bosan mengingatkan, memberikan semangat, terima kasih atas segala kebaikan dan kerelaan waktunya.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



## RIWAYAT HIDUP

Epri Setiawan, Lahir pada tanggal 01 April 1997 di Panggung Rejo, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Darso dan Ibu Tarmini. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Panggung Rejo dari tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Rawajitu Selatan dari tahun 2009-2012, setelah itu melanjutkan ke SMK Darul A'mal Metro dari tahun 2012-2015 dan di tahun 2016 penulis langsung masuk ke Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah”.

Bandar Lampung, 24 Februari 2020  
yang membuat

Epri Setiawan  
1621020332





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa’at kelak.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak DR. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Ayahanda Darso dan Ibunda Tarmini serta adik saya tercinta Yunita Sari yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa fakultas syariah wabil khusus jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 24 Februari 2020  
Penulis

**Epri Setiawan**  
**NPM. 1621020332**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
1. Alasan Obyektif.....	2
2. Alasan Subyektif .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Signifikasi Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis .....	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
I. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Data .....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Metode Pengolahan Data.....	6
5. Metode Analisis Data.....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tentang Fikih Siyasah.....	21
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	21
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah .....	23
3. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah .....	25
4. Nilai-Nilai Dasar Fikih Siyasah .....	31
B. Teori Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	35

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Biografi Al-Mawardi.....	39
1. Kelahiran dan Perkembangan Pendidikan Al-Mawardi ..	40
2. Kondisi Sosial dan Politik pada Masa AL-Mawardi .....	40
3. Karya-Karya Al-Mawardi .....	41
B. Pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi .....	42
1. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin .....	42
2. Syarat-Syarat dan Karakteristik Pemimpin .....	43
3. Mekanisme Pemilihan Pemimpin.....	43
C. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah .....	43

### **BAB VI ANALISA DATA**

A. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran Al-Mawardi	
---	--

tentang pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi .....	44
B. Relevansi pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	44
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Rekomendasi .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul dari skripsi ini ialah **“Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah”**. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda, maka diperlukan adanya penjelasan dari berbagai istilah yang terdapat pada judul besar sehingga skripsi ini relevan dengan yang penulis maksudkan. Adapun istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa itu terbentuk dan terjadi dan juga untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya secara konkrit terhadap suatu peristiwa sebab musabab keadaan tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Wiradi analisis adalah suatu tindakan atau kegiatan memisahkan dan mengklarifikasikan sesuatu, yang kemudian dikelompokkan sesuai parameter tertentu.<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud analisis adalah ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan yang mendalam dan terstruktur bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan kupasan mengenai suatu soal.
2. Fiqih Siyasah ialah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>
3. Pemikiran adalah proses perbuatan atau cara pemikir problem yang memerlukan pemecahan masalah.<sup>4</sup>
4. Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia seorang pemikir Islam terkenal, ahli fikih terkemuka dari ahli Mazhab Syafi'i dan tokoh politik cukup berpengaruh pada masa Daulah Abbasiyah. Adapun karya-karya yang ditulis Al-Mawardi diantaranya adalah *Al-tafsir*, *Adab Al-Qody*, *Adab Al-Dunya wa Al-Din*.<sup>5</sup>
5. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan atau keterkaitan antara suatu hal yang satu dengan yang lain.<sup>6</sup> Relevansi itu sendiri memiliki arti hubungan atau keterkaitan antara dua hal yang terikat jika antara keduanya disatukan maka hal tersebut akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 adalah dasar hukum adanya peraturan mengenai pemilihan kepala daerah atas perubahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 yang disahkan pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130.<sup>7</sup>

Melihat dari berbagai istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas yang dimaksud dengan Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ialah menganalisis bagaimana proses atau mekanisme pemilihan kepala daerah dari pandangan tokoh politik Islam yaitu Al-Mawardi dan hukum di Indonesia terkhusus Undang-Undang Nomor 10 Tahun

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 105.

<sup>2</sup> Rudi Erwin *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.8.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.4.

<sup>4</sup> Ibid. h.1073.

<sup>5</sup> Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.365.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1158.

<sup>7</sup> Tersedia di [http://mkri/publik/content/jdih/UU Nomor 10 Tahun 2016](http://mkri/publik/content/jdih/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016), di unduh (16 Oktober 2019).

2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan mengetahui bagaimana relevansi dari kedua teori tersebut.

## B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang memotifasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini yaitu :

### 1. Alasan Obyektif

- Al-Mawardi termasuk tokoh yang memiliki berbagai pemikiran tentang pemilihan pemimpin yang banyak dibahas di Indonesia terutama tentang bagaimana mekanisme dan karakteristiknya, karena mayoritas masyarakat saat ini sangatlah minim kepercayaan terhadap pemimpin disebabkan maraknya pemimpin yang mengabaikan rakyatnya dan banyak yang tersandung berbagai kasus terutama korupsi.
- Pemahaman masyarakat Indonesia terutama terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang masih kurang yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum.

### 2. Alasan Subjektif

- Pokok bahasan judul ini sangat relevan dan berkaitan erat dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- Terdapat banyak sarana dan prasarana yang menjadi penunjang terlaksananya penelitian ini, seperti literatur-literatur yang mudah di dapatkan di perpustakaan.

## C. Latar Belakang Masalah

Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia pemikir Islam terkenal ahli fiqih terkemuka dari ahli mazhab Imam Syafi'i dan tokoh paling berpengaruh pada masa Daulah Abbasiyah. Ia hidup antara 364 H/972 M ia belajar hadis di negeri Bashrah kepada Hasan bin Ali Muhammad Al-Jabali kemudian belajar fikih kepada Abdul Qasim Abdul Wahid bin Muhammad As-Shamiry Al-Qady, ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumikan di kota Al-Manshur di daerah Babi Hard Baghdad.<sup>8</sup> Al-Mawardi terpilih menjadi qadhi (hakim) di beberapa negara dan cukup terkenal, sehingga mendapat gelar *Aqdal Qudat* (hakim agung).

Banyak karya-karya yang ditulis Al-Mawardi, diantara tulisannya dibidang politik yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Nomorrma-Nomorrma Pemerintahan)*, *Nashihahn Al-Muluk (Nasehat Untuk Para Pemimpin)*, *Adab Al-Wazir*.<sup>9</sup> Karakter pemikiran Al-Mawardi juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh klasik abad sebelum masehi seperti Plato, Aristoteles dan tokoh Islam Ibnu Abi Rabbi. Al-Mawardi selalu mengutamakan perpolitikan yang sesuai dengan syari'at untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan manusia, maka dari itu masyarakat harus mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara.<sup>10</sup>

Dalam Islam sendiri tidak hanya mengatur ibadah dan akhlak serta urusan akhirat saja, tetapi juga mengatur urusan dunia termasuk bagaimana cara hidup bersosialisasi maupun bernegara salah satunya yaitu pemilihan seorang pemimpin hal ini disebutkan dalam dalil : *Pertama*, berdasarkan Al-Qur'an :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

<sup>8</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2017), h.5.

<sup>9</sup> Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, h.366.

<sup>10</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al Diniyah*. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Insani, 2000), h.15.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah (1) : 30)

Kedua, berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi :

وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Tidak boleh tiga orang berada disuatu tempat dimuka bumi ini, kecuali bila mereka memilih salah seorang diantaranya sebagai pemimpinnya”.

( H.R Ahmad ).<sup>11</sup>

Dari dalil di atas para Jumhur Ulama menafsirkan ayat di atas sebagai indikasi atau seruan dari Allah SWT untuk mengangkat seorang pemimpin dimuka bumi.<sup>12</sup> Sebagaimana diterangkan dalam hadis harus ada satu pemimpin dalam satu wilayah agar adanya orang yang menjadi panutan serta membuat kebijakan demi menciptakan kesejahteraan wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran para politikus dan sejarawan Islam yang kemudian melahirkan teori-teori yang sesuai dengan konsep serta syarat-syarat dan kriteria pemimpin dalam Islam, salah satu pemikir Islam seperti Al-Mawardi.

Al-Mawardi menegaskan bahwa syarat-syarat pemilihan pemimpin, perangkat yang diperlukan yaitu : *pertama* para pemilih (*Ahl al-ikhtiyar*) mereka adalah orang yang memilih pemimpin, dan syarat untuk menjadi pemilih antara lain : (1)Adil, (2) mempunyai wawasan tentang siapa yng pantas menjadi pemimpin, (3) memiliki kebijakan yang tepat sehingga ia memilih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin. *Kedua* para kandidat pemimpin (*ahl al-imamah*) mereka adalah calon-calon yang di persiapkan menjadi pemimpin, syarat untuk setiap kandidat yaitu : (1) adil (2) ilmu yang luas, (3) panca indra dan anggota tubuh yang normal.<sup>13</sup>

Mengenai konsep pengangkatannya ada dua prosedur. *Pertama*, Proses pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul hallil wa aqdi* (para wakil rakyat) *Kedua*, penunjukan atau wasiat dari imam sebelumnya. Cara kedua ini terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Shidiq kepada Umar bin Khatab. Adapun dalam proses pengangkatan kepala daerah ialah *Pertama* dengan cara ditunjuk oleh *khalifah* (pemimpin) yang menyerahkan kewenangannya untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seorang yang diangkat sebagai kepala daerah. *Kedua* diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khilafah bidang pemerintahan) dalam hal ini atas izin dari *khalifah* atau atas kewenangannya sendiri.<sup>14</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yang dimaksud demokrasi Pancasila yaitu suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia yang terkandung di dalam idiologi Pancasila, yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat memang sudah berlaku dalam banyak negara modern, seperti Indonesia sebelum dilaksanakannya pemilihan presiden langsung pada 2004, dimana Presiden secara periodik dipilih dan

<sup>11</sup> Imam Ahmad bin Muhammad Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (terj. Amir Hamzah, Fukhruddin dan Hanif Yahya), Juz III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.139.

<sup>12</sup> Ninu M Armand, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: Pustaka RI, 2005), h. 84.

<sup>13</sup> Dedy Ismatulloh, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) , h. 41.

<sup>14</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, h. 63.



diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan tertinggi dalam konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen 2000-2003.<sup>15</sup>

Adapun bukti bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem kenegaraannya adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum atau yang di sebut dengan Pemilu. Pemiliha Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan penggantian pemerintah dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka diparlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.<sup>16</sup>Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam proses Pemilihan Umum sebagai indikator proses demokrasi di Indonesia.

Demi menciptakan proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme Pemilu, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi.<sup>17</sup> Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif yang meliputi DPR RI, DPD, DPRD (Provinsi), DPRD (Kabupaten/Kota), lalu pemilihan eksekutif yang meliputi Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan secara serentak pada kali pertama pada pemilu 2019 yang lalu. Demokrasi merupakan proses pemilihan untuk mengisi jabatan Gubernur, Bupati/wali kota, kepala desa sampai ketinggian terendahpun dilakukan demokrasi seperti tingkat RT.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hal memilih ataupun dipilih dalam pemilihan pemimpin, yang kemudian di atur didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi :

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih”.

Artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan bebas berpendapat dengan menentukan pilihannya asalkan sesuai dengan koridor peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin yaitu taat kepada Tuhan dan hukum, berpendidikan, mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas dari tindak pidana apapun.<sup>18</sup> Fiqih siyasah mengatur mengenai pemilihan pemimpin hampir selaras dengan pemikiran Al-Mawardi, hanya saja dalam pembahasan fiqh siyasah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana konsep tentang pemilihan pemimpin (kepala daerah).

Sebagaimana konsep yang dipaparkan Al-Mawardi di atas secara umum terlihat jelas bahwa pemilihan pemimpin dilakukan dengan dua prosedur yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* dan pemilihan penunjukan oleh iman sebelumnya. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah Al-Mawardi menegaskan ada dua prosedur. *pertama*, kepala daerah diangkat langsung oleh khalifah *kedua*, kepala daerah diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khilafah bidang pemerintahan). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat yang bisa disebut dengan demokrasi.

Dengan demikian, atas pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah terjadi ketidak sinambungan atau ada kesenjangan, maka penulis tertarik untuk memberikan skripsi ini mengenai “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah”.

<sup>15</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) , h. 68.

<sup>16</sup> A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) , h. 95.

<sup>17</sup> Ibid. h. 83.

<sup>18</sup> Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana dasar pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin. Kemudian bagaimana relevansinya pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan dijelaskan tentang masalah yang akan diangkat penulis dengan mencari data-data agar tercipta laporan dan hasil penelitian yang lebih akurat dan mencapai sasaran penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman bagi pembaca, beberapa hal yang menjadi pokok-pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ?

#### F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin menganalisis pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin berdasarkan fikih siyasah.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

#### G. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dari skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan dan pelaksanaan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan hukum tatanegara.
  - b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya mengenai kepemimpinan yang sesuai dengan syari'at Islam.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pemilihan pemimpin dalam Islam untuk masyarakat luas khususnya umat Islam dengan harapan mereka bisa mengambil manfaat dari penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.
  - b. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis memahami bahwa banyaknya literatur yang membahas mengenai pemilihan kepala daerah dan tentunya mempunyai redaksi dan substansi masing-masing, baik dalam lingkup Universitas Islam maupun Universitas lainnya di Indonesia ini. Namun dengan melihat tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain agar terhindar dari plagiasi, dan penulis menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang membahas mengenai kepala daerah seperti :

*Pertama* dalam skripsi Ahmad Tamyis mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang membahas tentang: *Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis terhadap Pemikiran politik Al-Mawardi* tahun 2018. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa khusus mengenai pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep pemimpin dalam Islam sehingga diperoleh pemimpin yang ideal sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah.

*Kedua* dalam skripsi Muhammad Nasir mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang : *Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Persepsi Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah* tahun 2016. Dalam

sripsi tersebut peneliti membahas tentang pandangan antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mengenai sistem pemilihan kepala negara.

*Ketiga* dalam skripsi Aulia Mustikawati mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang membahas tentang: *Konsep Politik Al-Mawardi Mengenai Kepala Daerah* tahun 2016. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pemikiran Al-Mawardi mengenai Kepala Daerah dalam Islam dan dalam konteks kontemporer.

*Keempat* dalam skripsi Elina Putri Ramadhani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang membahas tentang: *Analisis Fikih siyasah terhadap pemikiran Al-Mawardi tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara 2020*. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang bagaimana pemikiran Al-Mawardi tentang konsep pengangkatan seorang kepala negara.

Dari hasil kajian pustaka di atas maka penulis berpendapat antara penelitian yang akan penulis bahas substansinya berbeda dengan kajian ilmiah di atas, terlebih dengan skripsi yang dibahas oleh Auliya Mustikawati dan Ahmad Tamyis yang keduanya sama-sama meneliti tentang pemikiran tokoh Al-Mawardi terkait dengan pemilihan kepala daerah, namun kedua bahasan skripsi tersebut masih umum sedangkan skripsi yang penulis buat lebih spesifik terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan kajian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah serta syarat dan kriteria dalam pandangan Al-Mawardi serta menganalisis bagaimana fikih siyasah memandang pemikiran Al-Mawardi mengenai pengangkatan pemimpin serta bagaimana relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sekumpulan pustaka (buku, majalah, artikel, biografi, jurnal, dokumenter) dan sumber data lainnya yang relevan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendalami mengenai pemilihan pemimpin menurut pandangan Al-Mawardi dan relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penyajian fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis kedalam fikih siyasah. Penelitian ini berusaha menggambarkan konsep pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

### **2. Sumber data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian ini. Sumber data meliputi tiga bagian yaitu data primer, data skunder dan tersier.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadis, buku-buku karya Al-Mawardi, sumber lain yang mengadopsi dari pemikiran Al-Mawardi terutama tentang pemilihan pemimpin, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

#### **b. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder adalah sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber data primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal termasuk juga sumber dari artikel.



c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menentukan fasilitas data dan kualitas penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan awal dari setiap penelitian. Studi dokumen bagi peneliti meliputi sumber primer, sumber skunder dan sumber tersier yang berkaitan dengan konsep pemilihan pemimpin. Setiap sumber ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil studi penelitian.

4. Metode Pengelolaan Data

Secara umum teknik pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) ialah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

5. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, penulis menggunakan metode *Analisis Deskriptif*, yaitu suatu metode menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk melihat performa data di saat ini atau masa lalu dengan cara menelaah secara teratur dan dilakukan secara cermat agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Skripsi, *Konsep Pemimpin dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi*, h.26.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemah, *Yayasan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an*, Jakarta: 1 Maret 1971.
- Al-Imam Abu Al-Hasain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim*, (terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin), Jilid, III, cet. 1, Jakarta : Pustaka As-Sunnah 2010.
- Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajaj ibn Muslim Al-qusyairi an-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Kitab, *Imarah*, Baab, *Khiyar al-Aim 'mah Wasyirarih*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Imam Ahmad bin Muhammad Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Amir Hamzah, Fukhruddin dan Hanif Yahya, Juz III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992.
- Armando, Ninu M, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Pustaka RI 2005.
- A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dat al-Anshar, 1977.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Rangkang Education*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Dumaiji Abdullah, *al-Imāmah al-'Uzmā 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (terj: Umar Mujtahid), Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dahlan Abdul Aziz, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendi Mochtar, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat* t.tp: perc. Universitas Sriwijaya, 2001.
- Erwin Rudi *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

H.A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan MasalahMasalah yang Praktis*, Cet.Ke-4 Jakarta:Kencana,2011

Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Qisthi Pres, 2017.

Iman Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al Diniyah*. Tejemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Insani, 2000.

Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dan Syari'at Islam*, Terjemah Fadli Bahri dari kitab *Al-Ahkam sulthaniyah*, Jakarta: Darus Falah,2006.

Imam Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din, Hidup Indah dan Berkah Dalam Etika Islam*, penerjemah, Jamaluddin Editor Iqbal Dawani Cet-1 Jakarta: Alfa Book 2020.

Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo:al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961.

Iqbal Muhammad, *Fikih Siyasah*, Jakarta:Pren adamedia Group, 2014.

Ismatulloh Dedy, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.

Ibn Syarif Mugar, *Presiden Nomorn Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2006.

Jurdi Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

J. Prihatmoko Joko., *Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.

Mu'ti Muhammad Ali Abdul, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Mugar Ibn Syarif dan Zada Khammami, *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Mugar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2006.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet,Ke-19 Jakarta: Raja Grafindo,2013.

Muhammad bin Salih al-Usaimin, *Syarh Riyad as-Salihin*,Riyad: Dār al-Wa'ān Linnasyr, Yogyakarta: Pustaka As-Sunnah, 2018.

M. Dhiaudin Rois, *Teori Politik Islam*, Jakarta:Gema Insani, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.



Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Pulungan Suyuti, *Fikih Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Tim Pustaka Pionik, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 3, Jakarta : Pustaka Pionik, 2009.

## **B. Peraturan Undang-Undang**

PKPU Nomor.5 Tahun 2020 *tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada* tahun 2020.

Undang-Undang N0 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

## **C. Skripsi**

Ahmad Tamyis, *Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi*, skripsi program S1 Hukum Tatanegara Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018.

## **D. Jurnal**

Amin Muhammad, *Pemikiran Politik Al-Mawardi*, Jurnal Politik Profetik, Volume 04 Nomor 02 Tahun 2016.

Syafruddin Syam, *Jurnal Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia* Vol 2 Nomor 2 Edisi Januari-Juni 2017.

Saifuddin, *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Adalah, Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Hendri k, *Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum di Indonesia*, Al-Adalah, Vol. XII, Nomor3, Juni 2015.

Hasani Ahmad Said, *Radialisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Adalah, Vol, XII, Nomor.3, Juni 2015.

## **E. Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-197326/pilkada-langsung-akan-digelar-mulai-juni-2005>, diakses 04 juli 2020.

<http://digilib.uinsby.ac.id/7731/5/bab2.pdf>, diakses 05 juli 2020.

Pemilihan Pemerintah Daerah” (Online), tersedia di:  
[https://mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf). 16 Oktober 2019.